

# KESALEHAN SOSIAL SEBAGAI RITUAL KELAS MENENGAH MUSLIM

**Wasisto Raharjo Jati**

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Mampang Prapatan, DKI Jakarta  
Telp. +62-215225711

**Abstract:** The emergence of social piety is an interesting phenomenon among recent middle class Indonesian muslim. The aims and scope of social piety which established is to redefine spirituality. Process of reconstructing social piety can be traced from the intersection from both material and spiritual aspect. Spiritual is a holy effort to pray God and material can be analyzed as a complemter factor in spirtual effort. To become pious man is the main thing however the most intention are both recognition and representation from others. This article will elaborate more deeply about the meaning of social piety in recent middle class Indonesian muslim.

**Abstrak** Kemunculan kesalehan sosial merupakan fenomena menarik di kalangan kelas menengah muslim Indonesia kontemporer. Adanya upaya mendefinisikan secara ulang makna spiritual menjadi titik tekan munculnya kesalehan sosial tersebut. Proses terbentuknya kesalehan sosial dapat dilacak dari interseksi antara aspek material dan aspek spiritual dalam beribadah. Spiritual dipahami sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik, sementara material dapat dipandang sebagai alat penunjang spiritual tersebut. Menjadi orang saleh memang menjadi tujuan utama kesalehan sosial ini, namun yang lebih penting lagi adalah pengakuan dan afirmasi dari masyarakat terhadap kesalehan sosial yang dkonstruksikan tersebut. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai makna kesalehan sosial dalm konteks kelas menengah kekinian.

**Kata-kata kunci:** kelas menengah muslim, kesalehan sosial, material, dan spiritual.

## A. PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai kesalehan sosial sedang marak terjadi di kalangan kelas menengah muslim Indonesia. Secara sederhana, pengertian kesalehan sosial dimaknai sebagai ekspresi dan praktik perilaku orang-orang Islam yang peduli

terhadap nilai-nilai Islam secara sosial, seperti halnya menyumbang dana bantuan berupa infaq, shadaqah, maupun amal jariyah, namun cenderung “abai” terhadap ibadah pribadi. Munculnya praktik kesalehan sosial tersebut merupakan bentuk ekspresi filantropis dan juga spiritualis yang hendak dilakukan kelas menengah muslim Indonesia. Adanya pertumbuhan ekonomi tinggi dengan semakin meratanya redistribusi pendapatan berkelindan dengan adanya kebutuhan akan donasi sosial.

Tumbuhnya kebutuhan akan kegiatan filantropis tersebut menyuburkan tumbuhnya berbagai macam lembaga donor dan amal. Pola pertumbuhan lembaga donor yang berdiri di luar masjid tersebut menarik untuk ditelisik bahwa sekarang ini nilai-nilai keagamaan kini sudah menjadi nilai umum. Masyarakat, utamanya kelas menengah muslim memaknai bahwa ritual-ritual sosial seperti halnya amal, zakat, infaq, dan shadaqah sendiri menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Menurut data yang dihimpun dari Republika (2015) menyebutkan potensi zakat bisa mencapai 15-20 triliun per tahun yang dihimpun dari kalangan kelas menengah muslim.

Besarnya dana yang dihimpun dari kalangan kelas menengah tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap sesama kini sudah semakin meninggi. Tingginya angka kepedulian tersebut mempunyai similaritas dengan munculnya gerakan kesalehan sosial yang tengah menggejala. Hubungan kesalehan sosial sebenarnya merupakan bentuk antitesis terhadap kesalehan spiritual yang menekankan pola peribadatan yang tekun seperti haji, umrah, dan lain sebagainya. Namun cenderung abai terhadap praktik sosialnya.

Dalam hal ini, penting juga untuk dilihat bahwa munculnya gerakan kesalehan sosial dengan adanya rumusan agama Islam baru yang hendak dirumuskan oleh kelompok kelas menengah muslim Indonesia. Kesalehan sosial sebenarnya juga merupakan bagian dari sebuah proses pendefinisian ibadah agama Islam secara terapan dalam konteks kekinian. Artinya, telah terjadi tafsir baru dalam memahami agama Islam dalam kasus kelas menengah muslim kekinian. Tulisan ini akan mengulas secara elaboratif mengenai ritual kesalehan sosial bagi umat kelas menengah muslim Indonesia, serta penjelasan berbagai macam tafsir atas Islam yang kemudian melahirkan adanya Islam gaya baru yang disesuaikan dengan tingkat religiusitas kelas menengah muslim Indonesia.

## **B. ISLAM WASATIYYAH DAN MUNCULNYA INISIASI KELAS MENENGAH MUSLIM**

Munculnya berbagai macam praktik kesalehan sosial yang dinisiasi oleh kelas menengah muslim di Indonesia sangatlah erat kaitannya dengan mun-

culnya pemahaman Islam *Wasatīyyah*. Pengertian *wasat* sendiri dapat dianalisis dalam berbagai pengertian seperti halnya “jalan tengah”, “adil”, “pilihan”, “paling baik”, Berbagai macam pengertian itu tersebut dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 143 berbunyi *wa kadzālika ja'alnākum ummatan washatan...* (Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang “**wasat**”) (Bachtiar, 2013).

Dalam konteks Indonesia sendiri, makna *wasat* kemudian diterjemahkan dalam bentuk “Islam Jalan Tengah” atau “Islam Moderat”. Pilihan kata tersebut sebenarnya merujuk pada terbentuknya Islam Indonesia yang inklusif dan mampu menjadi pedoman nilai dalam menentukan peradaban bangsa. Ditinjau secara politis, Islam *wasatīyyah* ini merupakan respons dan juga sinergisitas antara Islam Nusantara yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama dengan Islam Berkemajuan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah. Dengan demikian, secara harfiah Islam *wasatīyyah* sendiri dimaknai sebagai tampilan Islam khas Indonesia yang inklusif dan mampu beradaptasi dalam perkembangan zaman.

Pengalaman Islam *wasatīyyah* ini juga bisa dikatakan sebagai respons terhadap berbagai macam konstelasi politik internasional yang berkembang cenderung mendiskreditkan nama Islam. Adanya berbagai macam kasus terorisme yang mengatasnamakan Islam dan juga kebangkitan pandangan Islam Salafi yang secara sempit dalam memberikan pandangan terhadap amalan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Islam Indonesia secara konsep yang berbasiskan pada nilai *tasāmuh* (moderat), *tawāzun* (berimbang), *ta'ādul* (*adil*) yang berlandaskan pada Ahlussunnah Wal Jamaah. Dengan kata lain, Islam *wasatīyyah* berupaya untuk menjadikan Islam secara *rahmat al lil alamin* yang tidak hanya berbasis pada agama saja, namun juga sudah berwujud sistem nilai dan norma.

Pengertian lain mengenai Islam *wasatīyyah* dikaji oleh Islam di garis tengah dan bersikap proporsional di antara kepentingan materialisme dan spiritualisme, kemanusiaan dan ketuhanan, masa lalu dan masa depan. Dua karakter penting yang diamalkan dalam Islam *wasatīyyah* sendiri terletak pada dua hal: (1) *al-khayriyyah*, serba berorientasi yang terbaik, afdal dan adil; dan (2) *al-Bainiyyah*, pertengahan, moderat, tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri (Damanhuri, 2014). Dengan mengambil sikap garis tengah, umat Islam menjadi sentral dari segala macam pusat peradaban dan juga agama-agama dunia seraya tetap menampilkan tampilan inklusif dan modernis.

Pengamalan Islam *wasatīyyah* ini juga perlu tidak terlepas dari berbagai macam kontroversi yang ditimbulkan. Misalnya saja, Islam model ini berusaha

memecah belah umat Islam Indonesia dengan membentuk paham baru. Selain itu pula muncul pula pandangan bahwa, Islam *wasāṭan* ini juga bertujuan untuk mendiskreditkan kelompok Islam tertentu sehingga tertekan memusuhi sesama umat sendiri. Dikarenakan mengambil sikap garis tengah, pengamalan ajaran dan nilai Islam yang diajarkan sesuai dengan Qur'an dan Hadist yang disesuaikan dalam perkembangan zaman. Islam *wasāṭiyyah* berupaya untuk menjadikan pengamalan nilai dan ajaran Islam sendiri agar konstektual dengan perkembangan zaman (Azra, 2005). Dengan demikian, Islam masih relevan untuk menjawab segala bentuk permasalahan hidup umat dalam era kontemporer. Selain sebagai bentuk strategi adaptif dalam menghadapi dinamika zaman, Pemahaman *wasāṭiyyah* sebagai bentuk pembentukan masyarakat ideal bagi umat Islam yang dapat berkembang tanpa harus kehilangan identitasnya. Dengan bersikap sebagai masyarakat jalan tengah, maka dapat sebagai pen jembatan antara liberal dan sekuler sehingga dapat bersikap akomodatif antar keduanya.

Menurut Ali Nurdin (2006: 107 – 108), pembentukan masyarakat *ummatan wasāṭan* sendiri juga terkait adanya kebutuhan untuk membentuk masyarakat harmonis, adil, dan juga toleran. Dalam Islam sendiri, konsep pembangunan masyarakat Islam selain halnya *ummatan wasāṭan* dapat dikategorisasikan menjadi 4 kategori. Pertama, *ummatan wahidah* yakni kesatuan umat yang didasarkan iman kepada Allah dan nilai-nilai kebajikan. Bentuk pembangunan masyarakat seperti ini lebih mengarah pada pembentukan kekhalifahan Islamiyah. Kedua, *ummatan muqtasidah* yakni umat yang berlaku pertengahan. Istilah ini sebenarnya mengacu pada kelompok Yahudi dan Nasrani dalam menerima dakwah Rasulullah, namun lebih ditekankan pada aspek kedermawanan dan tidak boros dalam mengelola harta (2006: 110). Ketiga, *khayru ummah* yakni umat yang gemilang ketika terjadi puncak peradaban Islam semasa kekhalifahan berkuasa, umat mengalami banyak perkembangan dalam kemajuan teknologi dan peradaban. Keempat, *baldatun thayyiban* yakni negeri yang damai. Konsepsi itu merujuk pada pembangunan masyarakat Madinah dan Mekkah yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Qur'an dan Hadist.

Hubungan antara kesalehan sosial (*social piety*) maupun juga konsep pembangunan sosial kemasyarakatan yang menjadi unit analisis utama dalam tulisan ini dapat dianalisis dalam tabulasi berikut ini.

Tabel 1: Penerapan Kesalahan Sosial dalam Kelas Menengah Muslim

Sumber: (Nurdin, 2006) dengan berbagai perubahan

Dari penjelasan tabulasi tersebut, terlihat bahwa penerapan kesalahan sosial sendiri beragam jenis di setiap model pengembangan masyarakat kelas menengah muslim. Dalam dua model pengembangan masyarakat muslim berbasis pada *Ummatan Waḥidah* dan *Ummatan Muqtahidah*, kesalahan sosial dipandang sebagai bentuk relasi *ukhuwah*. Sedangkan dalam dua model terakhir yakni *balḍatun ṭayyiban* dan *khayru ummah* lebih melihat praktik kesalahan sosial sebagai bentuk eksklusifitas masyarakat muslim.

Terhadap berbagai macam konsepsi pembangunan masyarakat Islam tersebut, *ummatan waṣaṭan* sendiri lebih ditekankan pada pembangunan masyarakat muslim ideal pada era sekarang, dengan alasan sebagai berikut. Pertama, konteks masyarakat ideal seperti yang dicitakan dalam kasus masyarakat Madinah dan Mekah tidak perlu diterapkan secara rigid dalam era sekarang, cukup hanya substansinya saja. Kedua, Dalam konstelasi global seperti era sekarang ini yang diwarnai dengan adanya gelombang ekstrimisme dan liberalisme yang akut. Maka sangat penting untuk membentuk masyarakat moderat yang dapat menjembatani keduanya. Ketiga, adanya pencarian terhadap rumah besar umat Islam yang ideal dan patut dicontoh.

Oleh karena itulah ritual-ritual Islam yang berdasarkan pada pengajaran Qur'an dan Hadist yang kaffah merupakan sesuatu hal urgen dan signifikan. Adanya pengajaran Islam yang moderat dan inklusif tersebut secara tidak langsung berdampak pada terbentuknya umat Islam yang inklusif pula. Dalam hal ini, munculnya kelas menengah muslim adalah bagian dari umat Islam

*wasataniyyah* tersebut. Pembangunan nilai yang penting dalam kasus kelas menengah muslim Indonesia adalah ideologi *al-Mā'ūn*. Wahid (2015: 7) melihat bahwa dimensi *al-Mā'ūn* ini merupakan sikap saling tolong-menolong, toleransi, dan saling santun-menyantuni. Konteks *al-Mā'ūn* sendiri adalah doktrin utama di kalangan warga Muhammadiyah untuk saling berbagi. Semangat filantropisme tersebut juga tidak terlepas dari akar filosofis berdirinya Muhammadiyah yakni pelayanan pada umat. Ketiga dimensi itulah yang sebenarnya menunjukkan bahwa sikap saling berbagi sesama umat adalah keutamaan sejati. Hal itu juga selaras dengan pandangan Islam *wasatan* bahwa untuk kesalehan sosial adalah jalan menuju *ummatan wasatan* (umat yang adil). Maka dengan berperilaku kesalehan sosial terhadap sesama, maka secara tidak langsung akan menimbulkan semangat ukhuwah di kalangan umat muslim.

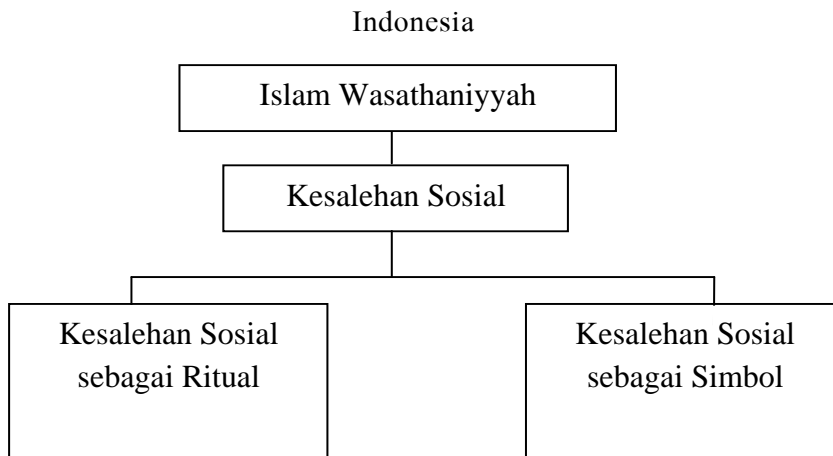
Relasi antara ritual kesalehan sosial dengan kemunculan kelas menengah muslim dapat dianalisis dalam dua tujuan penting. Faktor pertama, pengolahan nilai-nilai kebajikan Islam sebagai bentuk identitas pribadi dan faktor kedua, terbentuknya *ummah* sebagai bentuk ekspresi kebebasan dan keadilan yang selaras dengan pembangunan kultur dan kebudayaan (Harmsen: 2008: 318). Dua gagasan itu penting untuk dicatat, terutama untuk menautkan pembangunan masyarakat muslim berbasis *ummah* yang didorong oleh kelas menengah muslim dalam era sekarang ini. Tantangan utama dalam membangun *ummah* tersebut lebih terletak pada menselaraskan nilai-nilai kesalehan Islam dalam hubungannya dengan umat non muslim.

Hal kentara yang perlu untuk dilihat relasi interpersonal yang bisa saja memunculkan adanya tensi konflik sosial antara muslim dengan non muslim (Turner, 2011: 20). Nilai-nilai penting yang menjadi krusial di sini adalah *ḥalāl* maupun juga *hijāb*. Kedua istilah tersebut mengindikasikan sebagai bentuk penerapan kesalehan dalam Islam yang digunakan sebagai bentuk ekspresi identitas pribadi sebagai umat muslim. Kedua istilah terkadang menjadi sumber perdebatan yang justru mendiskreditkan dan mengeksklusifkan umat Islam dalam upaya membangun jembatan bina damai dengan umat beragama lainnya.

Oleh karena itulah, solusi kuratif yang ditawarkan oleh Cak Nun adalah untuk bisa memisahkan ritual tersebut dalam skope yakni kesalehan pribadi (*private piety*) maupun juga kesalehan sosial (*social piety*) (Azra, 2007: 147 – 148). Ekspresi identitas Islam yang sifatnya melekatkan pada diri sendiri agar tidak diungkapkan secara terbuka dan blak-blakan, supaya tidak mengundang pandangan arogansi terhadap umat Islam itu sendiri. Hal itu juga bagian dari bentuk upaya untuk mengurangi adanya semangat formalisme dan skriptualisme dalam kasus kelas menengah muslim itu sendiri.

Adapun pemaknaan kesalahan sosial sendiri lebih kepada strategi membangun relasi harmonis dengan sesama umat manusia lainnya tanpa harus meninggalkan jati diri umat Islam itu sendiri. Pengamalan kesalahan sosial ini muncul dikarenakan dua sebab penting yakni adanya stigmatisasi terorisme yang dialamatkan Islam dan juga eksklusifitas pengamalan nilai-nilai Islam yang terlalu esoteris sehingga menjadikan Islam tidak adaptif dalam perkembangan dinamika zaman. Berbagai macam diskursus mengenai kesalahan sosial sebagai jalan keluar dalam membentuk masyarakat muslim ideal telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan ahli.

Islam *wasathaniyyah* sebenarnya adalah ide klasik yang kemudian direvitalisasi kembali dalam diskursus sinergis antara nilai Islam dan pembangunan umat. Titik tekan utama untuk mensinergiskan kedua entitas itu terletak pada pemahaman Islam yang sifatnya eksoterik, namun tetap *syari'i*. Budaya-budaya Islam yang kemudian digali kembali seperti halnya *tasamuh* (moderat), *tawazun* (berimbang), *ta'ādul* (*adil*) kemudian ditetapkan sebagai nilai penting dalam membangun dan memperkuat kembali nilai-nilai Islam dan juga masyarakat Islam. Namun demikian, di satu sisi, ritual kesalahan sosial juga berkembang dalam budaya populer. Hal tersebut tidak terlepas dari adopsi nilai-nilai modernitas dalam Islam sehingga melahirkan Islam gaya baru. Adanya pengedepanan nilai-nilai modernitas itulah yang kemudian mendorong nilai-nilai Islam kemudian berkembang menjadi nilai umum yang diterima sebagai ritual ibadah bersama. Adapun percabangan terhadap ritual kesalahan sosial dalam kasus kelas menengah muslim dapat dilihat dalam tabulasi berikut ini.



Pembagian Tipologi Kesalehan Sosial dalam Kasus Kelas Menengah

Sumber: diolah dari berbagai data

Dari percabangan mengenai kesalehan sosial dari sudut pandang *Islam Wasataniyyah* sendiri kemudian terbagi atas dua cabang yakni 1) kesalehan sosial sebagai ritual dan 2) kesalehan sosial sebagai simbol. Pembagian kesalehan sosial tersebut didasarkan pada kedalaman ritual ibadah yang dijalankan oleh kelas menengah mudlim tersebut. Dalam pengertian pertama, kesalehan sosial sebagai ritual dapat diartikan sebagai bentuk praktik neo-sufisme yakni melakukan peribadatan sosial untuk melalui ridha illahhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan seberapa intensitas mereka hadir dalam majelis *ta'lim* maupun juga seberapa intens mereka untuk pergi haji dan umrah. Adapun dalam pengertian kedua sendiri, kesalehan sosial sebagai simbol dapat dipahami sebagai bentuk ritual budaya populer massa yakni keimanan dan ketakwaan muslim dapat dibentuk melalui konsumsi komoditas religi. Dengan demikian, menjadi orang alim sekarang ini dapat dikonstruksi sekaligus pula diakui oleh orang lain di sekelilingnya. Maka pembahasan mengenai kedua ritual kesalehan sosial tersebut akan dibahas sebagai berikut.

### C. RITUAL KESALEHAN SOSIAL DALAM KELAS MENENGAH MUSLIM

Makna Kesalehan Sosial sebagai Ritual ini perlu diletakkan dalam dua pandangan mendasar yakni 1) seberapa dalam implementasi kesalehan sosial tersebut diterjemahkan dari Qur'an dan Hadist dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk sikap filantropis. 2) seberapa kuat sinergi yang ditimbulkan antara nilai norma sosial dengan nilai norma agama sehingga membentuk kesalehan sosial kelas menengah muslim.

Kedua pertanyaan itulah yang kemudian menjadi inti penting dalam melihat kesalehan sosial sebagai ritual. Beberapa studi mengenai hal tersebut datang dari beberapa sarjana yang mendalami kajian ini. Munculnya ritual kesalehan sosial dalam masyarakat kelas menengah muslim tidak terlepas dari proses revitalisasi Islam sebagai kekuatan politik maupun juga kekuatan kultural. Dari situlah kemudian proses pembentukan nilai, norma, prinsip Islam kemudian mengalami institusionalisasi sekaligus pula intimisasi. Pola institusionalisasi tersebut mengarahkan adanya terbentuknya pengaturan kesalehan sosial secara otoritatif baik melalui negara maupun ulama. Sedangkan pola intimisasi tersebut mengarahkan pada bentuk pembentukan komunitas kelas menengah muslim yang terikat pada ajaran agama sebagai pedoman.

Adanya pola institusionalisasi terhadap pola kesalehan sosial pada dasarnya bertujuan untuk menempatkan Islam sebagai nilai umum yang dominan (*put Islam at the centre of the public domain*) (Hilmy, 2010). Hal itu merupakan



bentuk kelanjutan dari adanya wacana Islam publik yang dikembangkan kelompok Islamis pasca-Orde Baru. Artinya dengan menerapkan nilai-nilai Islam tersebut, maka masyarakat akan menjadi saleh dengan sendirinya baik itu Islam maupun non Islam. Pola institusionalisasi tersebut merupakan bagian dari cara Islamisasi secara kultural dengan coba membentuk nilai-nilai Islam sebagai bentuk *taken for granted*. Oleh karena itulah, formalisasi syariah kemudian menjadi jalan penting dalam membentuk kesalehan sosial tersebut secara regulatif dan asetif (Hooker, 2008). Dikatakan demikian, dikarenakan perlunya adanya pengawalan dari negara dan ulama untuk mengatur dan menjaga umat Islam agar sesuai dengan dengan kaidah agama. Implikasinya adalah munculnya berbagai macam produk legal mulai dari Kitab Hukum Islam (KHI), ekonomi syariah, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu mencerminkan adanya sinergi antara dimensi *ukhrawi* dan *duniawi* sehingga kesalehan sosial dibentuk berdasarkan proses *taklid* terhadap ajaran agama dalam kehidupan. Adapun dari segi intimitas, ritual kesalehan sosial bagi kelompok kelas menengah muslim sendiri dibentuk berdasarkan prinsip *al-maslahah al-ammah* (kebajikan untuk umat) (Latief, 2013: 187).

Proses kebajikan untuk umat pada dasarnya merupakan bentuk spiritual sebagai *ummah* untuk saling tolong-menolong satu sama lainnya. Hal itulah yang kemudian banyak mendorong kegiatan humanitarian dan filantropis yang dilakukan oleh berbagai kelompok kelas menengah muslim pasca Orde Baru dengan terbentuknya berbagai macam lembaga donor sosial seperti halnya Rumah Zakat Indonesia di Jakarta, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid di Bandung, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, maupun juga Pos Keadilan Peduli Umat yang terafiliasi dengan PKS (Latief, 2013: 174 dan 180).

Melalui terbentuknya berbagai lembaga donor tersebut, maka proses intimisasi kelas menengah muslim kemudian dikuatkan sebagai suatu kekuatan. Terbentuknya lembaga donor tersebut juga memiliki pengaruh terhadap ter-sebarnya ritual sosial tersebut ke segmen kelas menengah lainnya. Artinya demikian, ritual donor sosial seperti yang dicontohkan di atas coba untuk mendeskripsikan bahwa Islam sendiri adalah universal dan diterima bagi semua golongan. Perilaku kesalehan sosial berbasis donor ini kemudian dicermati dalam ketiga spektrum yakni 1) kelompok kelas menengah muslim yang menginginkan negara mengontrol terhadap keyakinan, 2) kelompok kelas menengah yang melawan adanya campur tangan negara, 3) kelompok kelas menengah yang menginginkan adanya non intervensi negara dalam hal urusan donasi maupun juga filantropi sosial (Fauzia, 2013:5).

Terhadap ketiga perspektif tersebut, pada akhirnya mengerucut pada pertanyaan penting: apakah negara berhak atau tidak memiliki wewenang dalam mengatur “kesalehan sosial” tersebut? Ritual zakat sendiri menjadi tolok ukur penting dalam melihat kontestasi negara dan kelas menengah muslim dalam mengatur masalah kesalehan sosial tersebut. Studi Arskal Salim (2008) coba melihat adanya kontestasi kesalehan sosial tersebut melalui zakat. Dalam studinya tersebut, alasan zakat menjadi sumber konfliktual adalah pergeseran zakat yang semula hanya berbasis pada kesalehan sosial kini berkembang menjadi sumber ekonomi. Potensi zakat di Indonesia memang luar biasa karena karena nilainya bisa mencapai 100 triliun (Karta, 2015).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa terjadi institusionalisasi kesalehan sosial dalam kasus kelas menengah Indonesia. Maka zakat sebagai salah satu ritualnya menjadi penting dibicarakan lebih lanjut. Studi Saidurrahman (2012: 272 – 275) menjadi penting untuk membaca kontestasi dalam kesalehan sosial berbasis zakat tersebut. Zakat sendiri telah diatur formalisasinya melalui UU 38 / 1999 tentang terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) yang diatur negara dan juga LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola komunitas. Namun demikian, paska penerapan UU 23 / 2011 sebagai revisi atas UU 38 / 1999 dengan munculnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah menimbulkan polemik baru terhadap pengaturan zakat dimana pengumpulan dana oleh LAZ harus seizin dan disetorkan kepada BAZNAS selaku otoritas pengumpul zakat nasional.

Maka dari kasus zakat, kita bisa mengambil beberapa poin analisis mengenai kontestasi negara dan kelas menengah muslim dalam kesalehan sosial yang disajikan dalam tabulasi komparasi berikut ini.

No	Faktor Kesalehan Sosial	Posisi Negara	Posisi Kelas Menengah
1	Pemaknaan Ritual Kesalehan Sosial	Negara secara otoritatif ingin menegakkan diri sebagai <i>ummara</i> yang berwenang dalam mengatur relasi sosial warganya termasuk kesalahannya.	Kelas Menengah ingin dilihat sebagai <i>ummara</i> yang mampu membangun komunitas tanpa ada intervensi negara .
2	Pelaksanaan Ritual Kesalehan Sosial	Ritual kesalehan sosial cenderung dipahami secara esosentrik	Ritual kesalehan sosial dipahami secara eksosentrik
3	Posisi terhadap Kesalehan Sosial	Negara bersikap secular-otoritatif	Kelas menengah bersikap bersikap religius-deliberatif

Sumber: diolah dari berbagai macam data

## **D. KESALEHAN SOSIAL SEBAGAI IDENTITAS KELAS MENENGAH MUSLIM**

Perbincangan mengenai kesalehan sosial sebagai sebuah identitas pada dasarnya merupakan bentuk pembiasaan diri / kolektif untuk menerapkan nilai, norma, dan perilaku agamis dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses pembiasaan tersebut berkembang menjadi menjadi semacam fortifikasi terhadap pembentuk segmen kelas menengah berbasis pada ajaran ideologi pengajaran Islam yang mereka anut. Fortifikasi itu esensinya adalah membentuk masyarakat ideal sesuai dan sepadan, namun justru itu mengarahkan pada kontestasi antar segmen kelas menengah muslim tersebut. Kontestasi tersebut pada dasarnya untuk membentuk sikap dikotomis “kita” dan “mereka”, yakni proses identifikasi seberapa saleh untuk menjalankan perintah agama. Namun tidak disangka kemudian, dikotomis tersebut secara perlahan menggeser perilaku beribadah yang pada awalnya untuk membentuk spiritualisme, justru mengarah pada materialisme (Ibrahim: 2002,26 – 28)

Dengan kata lain, makna identitas kesalehan sosial kemudian dipahami sebagai bentuk “mematerialkan hal yang spiritual” dan menspiritualkan hal yang material”. Oleh karena itulah kemudian praktik kesalehan sosial bagi kelas menengah muslim Indonesia kontemporer dilihat dari seberapa intens uang yang digunakan untuk menjalankan ibadah dan seberapa produk religius untuk menunjukkan bahwa dia merupakan entitas yang Islami. Dengan kata lain, materialisasi terhadap peribadatan kemudian diejawantahkan dalam bentuk simbol-simbol religius.

Studi Riesebrodt (1993: 156) menunjukkan ada empat macam ritual kesalehan sosial tersebut dalam empat bentuk. 1) seberapa intens ibadah wajib maupun sunnah itu dilakukan, meskipun dalam taraf ini, ibadah sunnah yang berkembang menjadi identitas. 2) seberapa patuh, mereka menjalankan perintah berdasarkan pada Qur'an dan Hadist. 3) selebrasi terhadap perayaan keagamaan, 4) interaksi nilai-nilai sosial ekonomi dengan nilai religiusitas. Keempat indikator itu menjadi penting melihat dimensi materi sangatlah membentuk sikap menjadi saleh bagi publik dalam situasi kekinian.

Adapun dari empat indikator tersebut, sebenarnya ritual identitas kelas menengah muslim tersebut sebenarnya dapat dikategorisasikan menjadi dua arus besar yakni kebutuhan akan spiritual dan juga kebutuhan akan eksistensial. Pertama, kebutuhan akan spiritual tersebut dilihat dari seberapa orang menjalankan ibadah sosial di masjid, seberapa intens menjalankan ibadah haji dan umrah, dan lain sebagainya. Hal itulah yang kemudian ditunjukkan dengan adanya gelar haji sebagai simbol prestisius bagi orang yang pernah menunaikan

ibadah haji di Tanah Suci. Konstruksi sosial bagi muslim Indonesia adalah haji dan tuan guru adalah gelar terhormat dan dianggap sanggup untuk bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat muslim lainnya. Selain itu pula, dengan mengikuti kegiatan *ta'lim*, maka konstruksi saleh akan disematkan oleh orang lain terhadap orang yang mengikuti pengajian. Dengan demikian, kebutuhan akan spiritual sendiri melihat bahwa spiritual dibentuk karena kesadaran diri sendiri, dan kebutuhan akan diakui oleh orang lainnya.

Kedua, kebutuhan akan eksistensial tersebut diwujudkan dengan konsumsi komoditas yang dianggap religus dan dianggap mewakili Islam. Pengenaan baju gamis, jilbab, dan lain sebagainya adalah upaya menunjukkan eksistensi diri bahwa dia merupakan umat Islam dan orang taat beribadah dengan kesemuanya hal itu. Padahal hal itu masih sebatas kulit, namun belum mendalam sampai pada tingkatan ilmu.

## E. SIMPULAN

Hal yang bisa disimpulkan dari pembahasan kesalehan sosial dalam kasus kelas menengah Indonesia menunjukkan beberapa ambivalensi penting. Posisi ambivalensi tersebut terletak pada orientasi mengejar kesalehan, namun justru mencapai dengan cara-cara material. Selain itu pula pengakuan kesalehan sosial sendiri juga tidak diungkapkan langsung kepada Tuhan, namun juga diungkapkan kepada sesama manusia. Kondisi itulah yang sebenarnya sangat bertentangan dengan esensi kesalehan sosial itu sendiri yakni untuk meningkatkan kadar spiritualitas pribadi maupun kolektif. Membudayanya berbagai macam ritual kesalehan sosial yang diwujudkan dalam kegiatan berbasis masjid maupun non masjid menunjukkan bahwa spiritualitas merupakan komoditas penting dalam membentuk kesalehan sosial. Hal itulah yang mendorong banyak munculnya berbagai macam produk religius untuk mengkonstruksi berbagai macam identitas kesalehan sosial tersebut. Alhasil, konstruksi budaya populer berhasil menyugesti opini publik bahwa dengan mengonsumsi produk tertentu maka akan saleh seutuhnya. Pandangan tersebut kemudian menjadi nilai umum bagi kelompok kelas menengah muslim kekinian, bahwa menjadi saleh tidak harus selalu bersikap *zuhud*, namun juga bisa dilakukan dengan cara instan, cepat, dan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2005. *Dari Harvard sampai Mekkah*. Jakarta: Republika.  
\_\_\_\_\_. 2007. *Jejak-Jejak Jaringan Kaum Muslim*. Jakarta: Penerbit Hikmah.

- Bachtiar, Tiar. 2013. "Membahas Ulang Konsep Moderat (Wasathiyah)." from <http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2013/12/30/14006/membahas-ulang-konsep-wasathiyah-moderat.html>. Retrieved 10 November 2015.
- Fauzia, Amelia. 2013. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill.
- Hambert, Egbert. 2008. *Islam, Civil Society and Social Work*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hooker, M.B. 2008. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS.
- Hilmy, Masdar. 2010. *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*. Singapore: ISEAS Press.
- Ibrahim, Idi. 2002. "Dunia Simbolik dan Gaya Hidup dalam Beragama" dalam *Mediator* Vol. 3, No. 1. 2002.
- Karta, Ucu. 2015. "Potensi Zakat Indonesia Capai Rp 100 Triliun". From <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/07/15/nrix95-potensi-zakat-indonesia-capai-rp-100-triliun>. Retrieved 10 November 2015.
- Latief, Hilman. 2013. "Islam and Humanitarian Affairs: The Middle Class and New Pattern of Social Activism" dalam Burhanuddin, Jajat, et.al. *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Nuridin, Ali. 2006. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Riesebrodt, Martin. 1993. *Pious Passion*. Berkeley: University of California Press.
- Saidurrahman. 2013. "The Politics of Zakat Management in Indonesia" dalam *Journal of Indonesian Islam* Vol. 7, No. 2. December 2013.
- Salim, Arskal. 2008. *The Shift in Zakat Practice in Indonesia: From Piety to an Islamic Socio-Political-Economic System*. Washington: University of Washington Press.
- Turner, Bryan. 2011. *Religion and Modern Society: Citizenship*. Edinburgh: Cambridge University Press.
- Wahid, Salahuddin. 2015. *Menggemakan Kesalehan Sosial*. Dalam *Kompas*, 5 September 2015.
- Zuhri, Damanhuri. 2014. "Ummatan Wasathan." from <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/14/03/16/n2ib6i-ummatan-wasathan>. Retrieved 10 November 2015.